

HUBUNGAN INDIA DAN PAKISTAN PASCA SERANGAN UDARA DI BALAKOT PADA TAHUN 2019

Rastra Jabadiou Kutai¹

Abstract: *The relationship between India and Pakistan is an interesting relationship between two countries to study, because even though they have a history of war in the past and racial and religious sentiments that also add to the series of conflict between the two, India and Pakistan also still need each other in terms of their respective economies and politic, respectively. This research aims to analyze how the relationship between India and Pakistan after the 2019 Balakot Airstrike. The research method used is descriptive with secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The theory and concept used are neo-realism theory and the concept of diplomatic relations. The results of this study is that the relations between India and Pakistan has become worse after the 2019 Balakot Airstrike. This is marked by the various impacts on the economic and political relations felt by the two countries, such as the closing of airspace, the suspension of postal services, the increase in India's defense, and the occurrence of Persona Non Grata. So this is in accordance with neorealism theory, that the anarchist nature of the international system is true, shown by the mutual attacks between India and Pakistan which emphasize that there is no legitimate power in diplomatic relations between countries.*

Keywords: *India, Pakistan, 2019 Balakot Airstrike, economic relations, political relations*

Pendahuluan

Wilayah India dan Pakistan yang berdekatan membuat hubungan negara ini menjadi rumit, namun bukan hanya faktor wilayah yang berdekatan yang membuat hubungan kedua negara menjadi seperti itu, namun adanya sentimen agama serta ras yang berbeda, dan juga adanya sejarah masa lalu yang kelam semakin membuat hubungan kedua negara menjadi tidak baik-baik saja. Sejarah masa lalu yang mencakup pemisahan wilayah oleh Inggris pada tahun 1947 menjadi alasan kuat mengapa hubungan dua negara ini menjadi rumit, karena setelah pemberian kemerdekaan tersebut kedua negara ini terlibat dalam pertempuran senjata hingga tiga perang besar. Salah satu yang menjadi titik pusat dari segala konflik antara Pakistan dan India adalah konflik yang terjadi di sekitar wilayah Kashmir atau biasa disebut sebagai Konflik Kashmir (B.D. Metcalf dan T.R. Metcalf, 2006: 224-225).

Konflik Kashmir tercatat menjadi konflik yang menghasilkan banyak tindakan keras serta pemberontakan sehingga menyebabkan tewasnya banyak warga sipil. Meskipun segala usaha untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara telah banyak dilakukan, terbukti dengan adanya beberapa pertemuan di Shimla (Aziz, 2012), Lahore (Stimson Center, 1999), dan Agra (Mirza, 2009: 572), hubungan antara keduanya tetap terus berakhir tanpa kejelasan karena kedua negara tidak menandatangani deklarasi bersama maupun dokumen serupa. Berbagai upaya ini menjadi terhambat juga

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: rjabadiu@gmail.com.

dikarenakan adanya aksi-aksi terorisme yang terjadi. Salah satu aksi terorisme yang dimaksud adalah serangan bom yang terjadi di wilayah Pulwama, yang kemudian menjadi serangan paling mematikan terhadap anggota keamanan India di Kashmir sejak tahun 1989.

Pulwama merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kashmir dan pemerintahannya dikuasai oleh India. Aksi pengeboman terjadi pada 14 Februari 2019, dengan kronologi 78 kendaraan yang terdiri dari 2.500 anggota *Central Reserve Police Force/CRPF* (Lembaga kepolisian India) sedang melakukan konvoi dari wilayah Jammu menuju Srinagar, kemudian salah satu dari 78 kendaraan yang sedang melakukan konvoi tersebut ditabrak oleh mobil dengan muatan 350kg bahan peledak. Aksi terorisme tersebut kemudian menewaskan 40 anggota CRPF. Kelompok teroris bernama *Jaish-e-Mohammed* (JeM) mengakui bahwa serangan tersebut adalah tanggung jawab mereka ([The Times of India, 2019](#)). Tujuan utama dari JeM adalah memisahkan wilayah Kashmir di bawah pemerintahan India dan menyatukannya dengan wilayah Kashmir yang berada di bawah pemerintahan Pakistan. JeM terbentuk pada tahun 2000 dengan Maulana Masood Azhar sebagai pemimpinnya yang pada saat itu mempunyai hubungan dekat dengan kelompok teroris lainnya yaitu Taliban dan Al Qaeda ([Roggio, 2016](#)).

Beberapa ahli menyatakan bahwa meskipun keberadaannya telah dilarang di Pakistan pada tahun 2002, JeM sendiri ternyata terbentuk oleh dukungan badan intelijen utama Pakistan bernama *Inter-Service Intelligence* (ISI) sehingga pada saat ini JeM beroperasi di Pakistan dan juga aktif di wilayah Kashmir ([Riedel, 2011: 69](#)).

Setelah terjadinya serangan di Pulwama, Pemerintah India memberikan beberapa tindakan yang diarahkan kepada Pakistan, seperti tindakan menaikkan sekitar 200% bea masuk barang hasil impor yang berasal dari Pakistan ([The Times of India, 2019](#)), mendesak *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* agar memasukkan Pakistan ke dalam daftar hitam agar pencucian uang dan pendanaan terorisme di dalam JeM dapat diperangi ([Singh, 2019](#)), serta berhasil menangkap dua teroris dan dua anggota militan JeM untuk kemudian dieksekusi dalam pertemuan anti-terorisme pada 18 Februari 2019, di antaranya adalah Abdul Rasheed Ghazi alias Kamran yang dianggap sebagai dalang serangan yang terjadi di Pulwama dan komandan JeM ([Shekar, 2019](#)), Hilal Ahmed yang ditembak mati dalam penangkapan tersebut bersama dua militan lain yang identitasnya tidak diketahui ([Singh dan Dua, 2019](#)).

Kemudian pada 26 Februari 2019, terdapat dua belas pesawat tempur milik Angkatan Udara India yang melintasi Garis Kontrol (LoC) untuk kemudian menjatuhkan bom di atas wilayah Balakot yang terletak di Pakistan. Pemerintah India menyatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menyerang kamp pelatihan milik JeM ([Bloomberg Quint, 2019](#)). Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Pakistan dengan cepat mengerahkan pesawat tempur mereka agar mampu mencegat pesawat tempur milik India dan memaksa mereka agar segera kembali melewati Garis Kontrol yang telah ditetapkan ([BBC News, 2019](#)).

Terdapat perbedaan mengenai korban yang dihasilkan atas serangan ini, menurut pernyataan penduduk setempat di Balakot bahwa serangan udara tersebut meleset dan hanya menyebabkan satu orang terluka, sedangkan Menteri Luar Negeri India Vijay Gokhale menyatakan banyak teroris JeM yang tewas. Beberapa orang menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat mengenai keberhasilan serangan udara India atas JeM ini berkaitan erat dengan isu pemilu India. Jika banyak militan teroris yang tewas maka hal ini akan membuat Perdana Menteri Narendra Modi mendapatkan banyak dukungan

karena penanganan aksi terorisme yang dilakukannya berhasil (Scarr, Inton, dan Huang, 2019).

Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

Teori Neo-realisme

Teori ini pada awal kemunculannya dianggap sebagai respon terhadap tantangan teori independensi dan juga sekaligus sebagai koreksi terhadap pengabaian kekuatan ekonomi yang terdapat dalam realisme klasik/tradisional. Menurut Kenneth Waltz dalam Burchill (1996: 83-87) bahwa teori neo-realisme ini adalah kritik atas realisme klasik, dan berikut merupakan perbedaan antara realisme klasik dan neo-realisme:

Tabel 1 Realisme Klasik dan Neo-realisme

| Aspek | Realisme Klasik | Neo-realisme |
|-----------------------------|--|--|
| <i>Definition</i> | Realisme percaya bahwa konflik muncul karena negara mementingkan diri sendiri dan merupakan unit pencari kekuasaan karena mereka terdiri dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak berubah | Neo-realisme percaya bahwa konflik muncul karena keadaan anarki. Karena tidak adanya otoritas utama/kewenangan pusat, negara berusaha mencari kekuasaan untuk membantu diri mereka sendiri |
| <i>Focus</i> | Sifat manusia | Struktur sistem |
| <i>Interests</i> | Isu kekuasaan | Bukan isu keamanan |
| <i>Strategical approach</i> | Penerapan strategi untuk mendekati konflik dalam hubungan internasional | Pendefinisian strategi untuk mendekati konflik dalam hubungan internasional |
| <i>System polarity</i> | Sistem unipolar yang artinya hanya ada satu kekuatan besar. Jadi, untuk menyeimbangkan kekuatan dalam sistem internasional, semua negara lain harus bersatu untuk menyamai kekuatan | Sistem bipolar yang artinya ada dua kekuatan besar. Sehingga hal ini membuat kekuatan internasional menjadi seimbang. |

Sumber: Koshal, "Difference Between Realism and Neo-Realism", tersedia di <https://www.differencebetween.com/difference-between-realism-and-vs-neorealism/#:~:text=Realism%20believes%20that%20conflicts%20arise,are%20self%2Dinterested%20and%20unchanging.&text=Neo%2Drealism%20believes%20that%20conflicts,seek%20power%20to%20help%20themselves,2011, diakses pada 17 Mei 2022.>

Dalam hubungan internasional, menurut pandangan neo-realisme, kekuatan menjadi faktor yang paling utama sehingga anarki adalah sistem internasional yang ada, yakni tidak adanya kekuasaan di atas kekuasaan lainnya. Sehingga, hal ini kemudian menyebabkan terjadinya dilema keamanan bagi semua negara, sebab sistem internasional yang anarkis akan memaksa negara memperlihatkan fungsi utamanya dan memiliki rasa tidak percaya terhadap satu sama lain dan berperang merupakan cara yang digunakan dalam mencari keamanan masing-masing (Burchill, 1996: 83-87).

Menurut Baldwin (1993), terdapat enam poin utama yang digunakan untuk memahami neo-realisme, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Anarki
Meskipun meyakini bahwa sistem internasional adalah anarkis, namun interaksi yang terjalin antarnegara yang berbentuk kerja sama masih memungkinkan untuk terjadi;
- b. Kerja Sama Internasional
Kerja sama antarnegara menjadi sulit untuk dilakukan, namun kemungkinan ini masih ada jika terjadi *balance of power* dari tiap negara;
- c. Keuntungan (*Gains*)
Keuntungan dapat dicapai melalui kerja sama internasional yang terjadi;

- d. Tujuan Negara
Neo-realisme menekankan isu keamanan dan militer (*hard politics*) sebagai tujuan negaranya;
- e. Maksud dan Kemampuan (*Intentions and Capabilities*)
Fokusnya negara-negara yang menganut paham neo-realisme adalah untuk bertahan hidup, karena jika hal ini tidak difokuskan maka negara tersebut hanya akan mengalami kerugian;
- f. Institusi dan Rezim
Kepentingan setiap negara menjadi sangat mempengaruhi rezim yang ada dan keyakinan setiap negara akan mempengaruhi institusi yang ada.

Sedangkan dalam buku yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics*, terdapat tiga fitur sistem internasional yang membuat aktor dalam sistem internasional menjadi saling takut, hal ini diungkapkan oleh John Mearsheimer (Suryanti, 2021: 30-31), yaitu sebagai berikut:

- a. Tiap negara mempunyai kemampuan militer yang ofensif;
- b. Tiap negara tidak dapat mengetahui maupun memastikan niat dari negara lainnya;
- c. Tiap negara mengetahui bahwa otoritas utama di antara tiap negara tersebut tidak ada dan hal tersebut kemudian membuat tiap negara menyadari tidak ada yang dapat melindungi mereka dari satu sama lain kecuali masing-masing negara memiliki kemampuan keamanan yang tinggi.

Neo-realisme juga memiliki dua cabang pemikiran yang menjadi dasar negara agar dapat menentukan posisi serta langkah strategis bagi negaranya (Suryanti, 2021: 30-31), yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

- a. *Defensive Realism* (Realisme defensif)
Fokusnya adalah menjaga keamanan nasional sehingga negara akan dianggap sebagai *security maximizers* (pemaksimal keamanan)
- b. *Offensive Realism* (Realisme ofensif)
Fokusnya adalah akumulasi kekuatan negara yang akan berujung pada hasil hegemoni regional suatu negara.

Konsep Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik memiliki kaitan erat dengan hubungan internasional karena dianggap sebagai cara yang digunakan untuk melakukan interaksi dalam hubungan internasional, dengan metode diplomasi ataupun negosiasi yang menjadi alatnya.

Terdapat tiga tindakan hubungan diplomatik (Yusvitasari, 2020: 83), yaitu:

- a. Nota Diplomatik
Biasanya terdiri dari nota protes serta nota keberatan yang dikirim oleh suatu pemerintah ke pemerintah lain. Selain itu, nota ini juga dapat digunakan dalam surat-menyurat dengan sifat resmi antarpemerintah terhadap perwakilan diplomatik di negara penerima;
- b. *Recall*
Dijelaskan sebagai tindakan penarikan kembali utusan ataupun perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh negara pengirim atau juga bisa dilakukan karena permintaan pemerintah negara penempatan. Hal ini biasanya dilakukan karena

adanya pemberhentian jabatan secara resmi, pemindahan tugas, atau untuk melakukan konsultasi karena suatu ketegangan telah terjadi antara negara pengirim dan penerima.

c. *Persona Non Grata*

Dalam Konvensi Wina Pasal 9 tahun 1961, Tindakan *Persona Non Grata* merupakan penlokatan atau pengusiran perwakilan diplomatik di negara penerima. Tindakan ini dilakukan jika keberadaan diplomat negara pengirim sudah tidak disenangi negara penerima, bisa terjadi jika disebabkan kepribadian diplomat tersebut seperti melanggar hukum negara penerima. Lalu dapat juga dilakukan jika negara penerima tidak memiliki kesamaan paham dengan negara pengirim terkait masalah yang bersifat politis (Bengi, 2019: 10).

Kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik dapat berubah seiring adanya perkembangan kondisi politik internasional, sehingga hal ini menyebabkan beberapa hubungan dapat berujung damai, dan dapat juga berujung pada pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya dalam lingkungan internasional.

Pemutusan hubungan diplomatik biasanya dilakukan sebagai cara terakhir jika cara sebelumnya tidak dapat menghasilkan keputusan dan umumnya akan dianggap sebagai hal yang gawat. Terdapat tiga alasan mengapa sebuah negara memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap suatu negara lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika adanya perang antarnegara;
- b. Jika terdapat sengketa antarnegara sehingga cara lain seperti *Persona Non Grata* atau *Recall* dirasa masih tidak cukup;
- c. Jika terdapat kebijakan sebuah negara yang begitu bertentangan terhadap posisi negara-negara lain maupun jika terdapat kegiatan sebuah negara yang dirasa tidak wajar.

Metode

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu menggambarkan hubungan ekonomi dan politik antara India dan Pakistan setelah terjadinya serangan udara di wilayah Balakot, Pakistan pada tahun 2019. Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan teknik pengumpulan menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga internet.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan India dan Pakistan Pasca Serangan Balakot

Hubungan Ekonomi

a. Pencabutan Status *Most Favored Nation* dan Penaikan Bea Masuk

Ketegangan dan persaingan politik antara India dan Pakistan mengakibatkan hubungan ekonomi antara kedua negara ini tidak pernah mulus. Pemerintah India tercatat menyumbang sekitar 70 persen untuk perdagangan Pakistan sejak tahun 1947 yang meliputi kain sintesis, produk minyak bumi, gula, teh, bahan kimia, dan kapas mentah. Komposisi ekspor resmi dari Pakistan kepada India adalah bahan kimia, wol, semen, buah-buahan & sayuran, dan juga produk minyak bumi. Kemudian pada tahun 1971, Pakistan dan India menandatangani perjanjian perdagangan pertama antara dua negara tersebut hingga akhirnya pada tahun 1996, India memutuskan untuk memberikan

status perdagangan *Most Favored Nation*² kepada Pakistan (Hussain dan Singla, 2020: 21). Namun, dengan adanya serangan di Pulwama yang merupakan dasar terjadinya serangan udara di Balakot kemudian membuat India menarik status MFN yang telah diberikan tersebut.

Dampak dari pencabutan status MFN ini akan menaikkan bea masuk atas impor Pakistan dan India secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menaikkan bea masuk sebesar 200% (Hussain dan Singla, 2020: 21) yang kemudian akan menyebabkan penurunan dalam ekspor Pakistan ke India secara signifikan. Perdagangan bilateral antara Pakistan dan India di kurun waktu 2018-2019 tercatat mencapai 2,6 miliar Dollar Amerika (USD) dengan rincian ekspor India dan Pakistan mencapai 2,06 miliar USD dan impor India dari Pakistan mencapai 295 juta USD. Selain itu, penaikan bea masuk ini juga meruigkan ekspor Pakistan ke India, bahwa dari sekitar 45 juta USD per bulan pada 2018 menjadi hanya 2,6 juta USD per bulan dalam periode Maret-Juli 2019.

Tingkat kerugian yang dialami oleh masing-masing pedagang Pakistan dan India dinilai variative berdasarkan sifat dan rute perdagangan. Dalam periode 2017-2019, impor India dari Pakistan memberikan 82% dari perdagangan yang melintasi jalur darat Wagah-Attari. Namun, pasca adanya serangan-serangan yang terjadi antara kedua negara, hanya sedikit barang yang terus diimpor dari Pakistan (Hussain dan Singla, 2020: 21-22).

Lebih dari 9.000 warga di wilayah Amritsar, wilayah India yang terkurung daratan dan berbatasan dengan Pakistan, menjadi sangat terdampak secara langsung karena ketergantungan mereka terhadap perdagangan bilateral dengan Pakistan, seperti operator stasiun bahan bakar, pedagang dan karyawannya, pengirim barang, pemilik dhaba, agen rumah pabean, buruh, dan penyedia layanan lainnya memutuskan untuk gulung tikar dan menutup toko.

Selain itu, ekspor kapas oleh India tercatat sebagai sektor perdagangan yang paling terdampak, karena akhirnya merugikan industri tekstil Pakistan karena kemudian Pakistan memutuskan untuk mengambil kapas yang lebih mahal yang berasal dari Mesir, Amerika Serikat, atau bahkan Mesir. Dampak serangan yang terjadi akhirnya secara langsung menghasilkan kenaikan harga yang berpengaruh dalam bisnis (Hussain dan Singla, 2020: 22).

b. Penutupan Wilayah Udara

Pada hari yang sama dengan terjadinya serangan udara di Balakot, Pemerintah Pakistan memutuskan untuk mengeluarkan *Notice to Airmen* (NOTAM) agar menutup wilayah udara mereka secara penuh dan membatalkan beberapa penerbangan komersial yang telah terjadwal di negara tersebut. Selain penerbangan komersial, beberapa penerbangan internasional juga dipaksa agar mengubah rute penerbangan dan agar tidak melakukan transit antara wilayah Pakistan dan India. Pada 27 Februari 2019, Angkatan Udara Pakistan melakukan serangan udara balasan yang kemudian akhirnya membuat India menutup sembilan bandarannya selama beberapa jam, masing-masing bandara terletak di Shimla, Pithoragarh, Srinagar, Amritsar, Leh, Kangra, Jammu, Kullu Manali, dan Pathankot. Menanggapi hal ini, Pakistan kemudian memperpanjang penutupan wilayah udaranya terhadap India.

² Status yang diberikan kepada mitra dagang internasional untuk memastikan perdagangan yang terjadi antara semua negara mitra WTO tidak diskriminatif. Jika diberikan status ini oleh negara lain, maka negara tersebut harus memberikan kekebalan, konsesi, serta hak istimewa dalam perjanjian dagang.

Namun, meskipun telah membuka rute untuk penerbangan komersil sejak 26 Maret 2019, Pemerintah Pakistan terus memperpanjang larangan wilayah udaranya dan bahkan melakukan revisi/perbaikan NOTAM yang dikeluarkan sebelumnya. Sementara itu, Pemerintah India juga mengeluarkan pengumuman untuk penghapusan semua pembatasan sementara yang berlaku di wilayah udara negaranya setelah serangan udara terjadi di Balakot (Hussain dan Singla, 2020: 65), hal ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Pakistan, karena pihak mereka menolak permintaan Pemerintah India terkait penerbangan seperti saat Presiden India Ramnath Kovind ingin menggunakan wilayah udara Pakistan untuk penerbangannya menuju Islandia dan menolak Perdana Menteri India Narendra Modi yang ingin menggunakan wilayah udara Pakistan untuk melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat melalui Jerman dan menolak lagi untuk perjalanan Perdana Menteri Narendra Modi dari India menuju Arab Saudi (Hussain dan Singla, 2020: 65).

Akibat hal ini, beberapa maskapai di India seperti *Air India*, *SpiceJet*, *IndiGo*, dan *GoAir* mengalami kerugian secara signifikan dengan perkiraan nilai rugi secara kumulatif mencapai 80 juta USD, sedangkan maskapai dari Pakistan mencapai nilai rugi sebesar 53 juta USD (Hussain dan Singla, 2020: 66). Secara keseluruhan sekitar 400 penerbangan India per hari yang biayanya menjadi tinggi dengan rute yang juga menjadi jauh lebih panjang (Hussain dan Singla, 2020: 67).

c. Penangguhan Layanan Pos

Pemerintah Pakistan memutuskan untuk menanggihkan layanan posnya dengan India secara sepihak hingga akhirnya membuat tidak adanya kegiatan surat-menyurat yang dikirimkan dan diterima antar dua negara. Selain menanggihkan, Pakistan juga membatasi kiriman pos India yang ditujukan untuk negara lain untuk transit di Pakistan. Keputusan Pakistan ini diambil karena pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reorganisasi Jammu dan Kashmir 2019 oleh India. Pengesahan RUU ini menjadi salah satu rangkaian masalah yang memicu ketegangan antara India dan Pakistan setelah serangan di Pulwama yang juga menyebabkan serangan udara di Balakot.

Pemerintah Pakistan menganggap bahwa RUU yang disahkan oleh India tersebut melanggar hukum internasional sedangkan India menganggap mengesahkan RUU tersebut tidak melanggar dan sah menurut hukum internasional serta domestik dan menjadi masalah internal negaranya.

Menanggapi aksi penangguhan ini, Pemerintah India mengungkapkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan norma internasional, bahwa peraturan pertukaran pos antarnegara diatur oleh *Universal Postal Union* (UPU) milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang artinya aturan tersebut mewajibkan sebuah negara yang menanggihkan pelayanan pos agar merinci durasi penghentian layanan dan memberikan informasi penangguhan kepada operator sistem pos negara yang ditanggihkan. Selain itu, Pemerintah India dan Pemerintah Pakistan juga mempunyai tiga perjanjian bilateral yang mengatur pertukaran pos antara keduanya, yaitu *Exchange Value Payable Article* (1948), *Exchange of Postal Article* (1974), dan *International Speed Post Agreement* (1987).

Dengan adanya penangguhan layanan pos yang terjadi antara Pakistan dan India semakin memberikan catatan buruk terhadap hubungan kedua negara, sebab hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah penangguhan berjalan selama 3 bulan, Direktur Jenderal dari Pos Pakistan memutuskan untuk mengeluarkan perintah agar memulihkan beberapa layanan dan menyatakan bahwa yang dibatasi hanya dokumen dan surat *Express Mail Services* (EMS) (Hussain dan Singla, 2020: 68-69).

Hubungan Politik

a. Serangan Balasan Pakistan dan Peningkatan Pertahanan India

Hubungan yang tidak baik antara Pakistan dan India semakin diperparah dengan terjadinya serangan udara di Balakot, Paksitan, yang juga menjadi serangan udara pertama setelah Perang Indo-Pakistan pada tahun 1971an. Tahun 2019 tercatat menjadi salah satu tahun terburuk dalam sejarah hubungan Pakistan dan India karena terdapat peristiwa yang banyak terjadi di tahun tersebut (Latif, 2019).

Satu hari setelah kejadian serangan udara, tepatnya di tanggal 27 Februari 2019, Pemerintah Pakistan membalas dengan menjatuhkan bom di wilayah Jammu dan Kashmir yang lokasinya berdekatan dengan instalasi militer serta menembak jatuh jet India. Dalam pertempuran udara yang terjadi antara Angkatan Udara (AU) Pakistan dan India, pasukan AU Pakistan berhasil menangkap seorang pilot asal India setelah sebelumnya dipaksa keluar dari pesawatnya di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Meskipun begitu, penahanan yang terjadi hanya sementara karena pada 1 Maret 2019, pilot India tersebut dibebaskan sebagai tanda itikad baik agar memperbaiki hubungan antara dua negara. Namun, ketegangan masih terus berlanjut seperti penembakan lintas batas sporadis antara Pakistan dan India (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2019: 13).

Pasca terjadinya serangan udara di Balakot, *India Air Force* yang merupakan AU India memutuskan untuk menempatkan sistem pertahanan udara mereka dalam keadaan siaga di sepanjang garis perbatasan internasional atau *Line of Control* (LoC) untuk menanggapi pembalasan yang mungkin dilakukan oleh AU Pakistan. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi memutuskan untuk melaksanakan pertemuan darurat di Islamabad guna membahas situasi keamanan yang terjadi dan secara tegas menyatakan bahwa tindakan pembalasan berhak untuk dilakukan oleh Pakistan.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga mengadakan pertemuan darurat hingga menghasilkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council* (NSC) Pakistan bahwa mereka menyangkal klaim India atas pegeboman dan penghancuran kamp teroris yang berada di Balakot dan menyatakan bahwa serangan tersebut adalah serangan yang tidak berasal. NSC menjelaskan bahwa setelah sesi parlemen bersama, tindakan pembalasan akan dilakukan oleh Pakistan (Khan, 2019).

Hubungan Politik

b. Pencabutan Pasal 370, Terjadinya *Persona Non Grata*, dan Perjanjian Bersama

Pencabutan Pasal 370 yang memberikan status otonomi khusus pada wilayah Kashmir di bawah pemerintahan India dicabut oleh India pada Agustus 2019. Hal ini dianggap sebagai tindakan lanjutan atas aksi saling serang yang terjadi di antara Pakistan dan India yang dimulai sejak 14 Februari 2019.

Dengan dicabutnya Pasal 370 ini, Kashmir kemudian harus mentaati dan mematuhi segala bentuk Undang-Undang India, padahal sebelumnya, Pasal 370 mengatur bahwa Kashmir memiliki konstitusi independen, bendera terpisah, dan mampu membuat Undang-Undang sendiri (kecuali yang berhubungan dengan luar negeri), sehingga tindakan yang dilakukan oleh India ini juga dianggap sebagai bentuk dari pengintegrasian Kashmir secara utuh dengan India.

Pemerintah India kemudian mencabut penerangan serta akses komunikasi di wilayah Kashmir selama beberapa hari agar protes serta kerusuhan tidak terjadi, karena

anggapan Pemerintah India bahwa jika komunikasi terputus maka media tidak akan mengetahui serta meliput apa yang telah terjadi di Kashmir (Mukti dan Puspitasari, 2020).

Pemerintah Pakistan menyayangkan tindakan pencabutan Pasal 370 yang dilakukan oleh India, karena hubungan normal yang diinginkan negara ini menjadi tidak akan berjalan lancar sampai Pemerintah India memutuskan untuk mengubah kebijakannya terhadap Kashmir hingga mereka membatalkan pencabutan Pasal 370 (Kakar, 2021). Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga menyatakan bahwa Pakistan telah memberikan perintah terhadap pasukan bersenjata negerinya agar tetap waspada dan memerintahkan agar tiap jalur diplomatik untuk mengekspos kekejaman dan kejahatan rezim dan pelanggaran HAM yang terjadi di Kashmir yang dikuasai India.

Keputusan pencabutan Pasal 370 untuk Kashmir ini kemudian mengakibatkan Pemerintah Pakistan mengusir komisioner tinggi India (setara Duta Besar) dari ibukota Pakistan, Islamabad. Selain mengusir perwakilan India dari negerinya, Pemerintah Pakistan juga gagal mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke New Delhi (BBC News, 2019).

Sementara itu dari pihak India, Menteri Urusan Luar Negerinya mengabarkan bahwa Pemerintah India mengeluarkan keputusan untuk mengusir dua perwakilan Pakistan karena terdapat tuduhan spionase dan meminta mereka untuk meninggalkan India dalam kurun waktu dua puluh empat jam pada Juni 2020. Dua perwakilan Pakistan tersebut ditangkap kepolisian Delhi saat mereka mendapatkan dokumen terkait keamanan pemerintah India. Menanggapi hal ini, Pemerintah India menerbitkan nota diplomatik berupa nota protes dan juga menyatakan dua pejabat yang terlibat tersebut dikenakan tindakan *Persona Non Grata* karena tindakan yang dilakukan keduanya dirasa tidak sesuai dengan status mereka sebagai anggota misi diplomatik (Shams, 2020).

Pemerintah Pakistan kemudian memanggil diplomat senior India yang berada di Pakistan guna mengajukan protes keras atas keputusan yang diambil tersebut. Pakistan mengecam dan menolak semua tuduhan yang dianggap tidak berdasar terhadap perwakilan diplomatiknya. Terjadinya tindakan *Persona Non Grata* ini semakin memperburuk hubungan antara Pakistan dan India setelah sebelumnya memang buruk sebab adanya aksi saling balas sejak Februari 2019 (NDTV, 2020).

Aksi saling tuduh dan aksi saling serang masih terus berlanjut hingga November 2020 saat Pakistan kemudian mengungkap sebuah dokumen dan secara langsung mengungkapkan keterlibatan India dalam mensponsori aksi terorisme serta terdapat adanya upaya untuk mengacaukan Pakistan. Pemerintah Pakistan menuduh India mendukung segala kampanye teroris yang tujuannya adalah untuk pemberontakan.

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa intelijen India beroperasi di bawah perlindungan diplomatik dari Konsulat India di Afghanistan. Semua tuduhan yang dibuat dan dimuat dalam dokumen tersebut baik berdasarkan bukti yang kuat maupun tidak berdasarkan bukti, hanya semakin memperburuk hubungan antara Pakistan dan India. Para ahli mempertanyakan dokumen yang dimaksud Pemerintah Pakistan dan beranggapan bahwa dokumen tersebut hanya bertujuan untuk meraih perhatian dari Pemerintah Amerika Serikat serta mempengaruhi kebijakan Presiden Biden terhadap India.

Namun, meskipun melakukan aksi saling tuduh dan saling serang, Pemerintah India dan Pakistan sepakat untuk patuh terhadap Perjanjian Bersama yang mulai berlaku

pada 24/25 Februari 2021 dan setuju berhenti untuk melakukan penembakan di sepanjang *Line of Control* (LoC) dan semua sektor lainnya.

Hal ini dapat menandai tonggak sejarah dalam hubungan Pakistan dan India yang rentan konflik, jika keduanya benar-benar membuat Perjanjian Bersama tersebut efektif. Sebelum ini, Pemerintah Pakistan dan India pernah setuju untuk melakukan gencatan senjata di LoC pada tahun 2003, dan jika Perjanjian Bersama di tahun 2021 berjalan efektif, maka ini menjadi perjanjian paling efektif antara keduanya. Perjanjian Bersama 2021 ini juga dinilai akan menjadi titik balik penting untuk Pakistan dan India mengurani kekerasan di wilayah Kashmir (Wolf, 2021: 2).

Perjanjian Bersama Februari 2021 ditandatangani oleh masing-masing Dirjen Operasi Militer atau *Director General of Military Operations*. Banyak pengamat memuji tindakan bersejarah ini dan menyatakannya sebagai pembuka jalan agar hubungan Pakistan dan India menuju ke hubungan yang jauh lebih baik. (Wolf, 2021: 2).

Kesimpulan

Hubungan antara Pakistan dan India menjadi semakin parah setelah adanya serangan udara yang terjadi di Balakot, sebuah wilayah di Pakistan. Pakistan dan India saling melemparkan tuduhan terkait serangan udara yang terjadi dan bahkan saling melakukan aksi balasan. Dampak nyata terkait hal ini dapat dilihat dalam hubungan ekonomi dan politik kedua negara.

Dalam hubungan ekonomi, India mencabut status *Most Favored Nation* yang sebelumnya pernah diberikan kepada Pakistan, penutupan wilayah udara oleh kedua negara, serta penutupan layanan pos oleh Pakistan terhadap India. Berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dua negara ini sama-sama mendapatkan kerugian ekonomi karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan ekonomi India dan Pakistan masih saling berkaitan. Sedangkan pada hubungan politik, terjadinya *Persona Non Grata* hingga ditandatanganinya Perjanjian Bersama antara kedua negara.

Hal-hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh teori neo-realisme, karena India telah melakukan serangan udara sebagai bentuk dari kemampuan negara tersebut untuk bertahan hidup, hal ini dilakukan akibat dari serangan sebelumnya yang terjadi di Pulwama. Dapat dilihat bahwa tidak adanya kekuasaan di atas kekuasaan lainnya seperti yang diungkapkan neo-realisme tersebut benar, karena sifat anarkis dalam sistem internasional memang ada dan terbukti pada kasus India dan Pakistan yang ditandai dengan sikap saling serang dan menganggap tidak ada kekuasaan yang sah dalam sistem internasional.

Berangkat dari hal-hal yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari hubungan antara India dan Pakistan pasca terjadinya serangan udara di Balakot adalah hubungan yang panas dingin terhadap satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Aziz, Sheikh. 2012. "A leaf from history: Simla agreement, at last", tersedia di <https://www.dawn.com/news/751253>.
- Baldwin, David A. 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia: Columbia University Press.
- BBC News. 2019. "Balakot: Indian air strikes target militants in Pakistan", tersedia di <https://www.bbc.com/news/world-asia-47366718>.

- _____. 2019. "Sengketa Kashmir: Pakistan 'turunkan' hubungan diplomatik dengan India", tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49273909>.
- Bengi, Sherly. 2019. "Persona Non Grata dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan". *Lex Et Societatis*. Vol. VII No. 7.
- Bloomberg Quint. 2019. "India Air Strike Destroys Terror Camp in Pakistan, Upto 350 Terrorists Killed", tersedia di <https://www.bloombergquint.com/politics/pre-dawn-indian-air-strike-destroys-jem-camp-in-pakistan-sources-say-up-to-350-terrorists-killed-3>.
- Burchill, Scott. 1996. *Theories of International Relations*. New York: St. Martin's Press, Inc.
- Hussain, Afaq dan Nikita Singla. 2020. *Unilateral Decisions Bilateral Losses: Assessing the impact of the face-off between India and Pakistan in 2019, on border economies*. New Delhi: BRIEF.
- Kakar, Harsha. 2021. "Article 370 and Pakistan", tersedia di <https://www.thestatesman.com/opinion/article-370-pakistan-1502967037.html>.
- Khan, Sanaullah. 2019. "Pakistan will respond to uncalled-for Indian aggression at time, place of its choosing: NSC", tersedia di <https://www.dawn.com/news/1466145>.
- Koshal. 2011. "*Difference Between Realism and Neo-Realism*", tersedia di <https://www.differencebetween.com/difference-between-realism-and-vs-neorealism/#:~:text=Realism%20believes%20that%20conflicts%20arise,are%20self%2Dinterested%20and%20unchanging.&text=Neo%2Drealism%20believes%20that%20conflicts,seek%20power%20to%20help%20themselves>.
- Latif, Aamir. 2019. "India-Pakistan in 2019: Mistrust plagues relations", tersedia di <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-pakistan-in-2019-mistrust-plagues-relations/1682882>.
- Metcalf, Barbara D. dan Thomas R. Metcalf. 2006. *A Concise History of Modern India (Second Edition)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mirza, Dr. Sarfraz. 2009. *Pakistan India Relations: A Chronology (1947-2008)*, Lahore: Nazaria-i-Pakistan Trust.
- Mukti, Demita Ayuwanda dan Anggun Puspitasari. 2020. "Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan pada Tahun 2016-2019". *Balcony: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*. Vol. 4 No. 2.
- NDTV. 2020. "Pak Summons Indian Diplomat Over Expulsion of 2 Officials on Espionage Charges", tersedia di <https://www.ndtv.com/india-news/pakistan-summons-indian-diplomat-over-expulsion-of-2-officials-on-espionage-charges-2238501>.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2019. *Update of the Situation of Human Rights in Indian-Administered Kashmir and Pakistan-Administered Kashmir from May 2018 to April 2019*. Jenewa: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.
- Poeteri, Olivia Razmana, Djoko Susilo, dan Sayani Indriastuti. 2014. "Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran (*The Severance of Diplomatic Relations of Canada Toward Iran*). *e-SOSPOL*. Vol. 1 No. 1.
- Riedel, Bruce. 2011. *Deadly Embrace: Pakistan, America, and the Future of Global Jihad*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.

- Roggio, Bill. 2016. "Pakistan again puts Jaish-e-Mohammed leader under 'protective custody'", tersedia di <https://www.longwarjournal.org/archives/2016/01/pakistan-again-puts-jaish-e-mohammed-leader-under-protective-custody.php>.
- Scarr, Simon, Chris Inton, dan Han Huang. 2019. "India-Pakistan Tensions: An air strike and its aftermath", tersedia di <https://graphics.reuters.com/INDIA-KASHMIR/010090XM162/index.html>.
- Shams, Shamil. 2020. "India Usir Diplomat Pakistan Atas Tuduhan Spionase", tersedia di <https://www.dw.com/id/india-usir-diplomat-pakistan-atas-tuduhan-spionase/a-53647375>.
- Shekar, Raj. 2019. "Pulwama attack mastermind Abdul Rasheed Ghazi killed by security forces in Kashmir", tersedia di <https://timesofindia.indiatimes.com/india/pulwama-attack-mastermind-abdul-rasheed-ghazi-killed-by-security-forces-in-kashmir/articleshow/68044481.cms>.
- Singh, Aarti Tikoo dan Rohan Dua. 2019. "Four Army personnel including Major martyred in encounter with terrorist in Pulwama", tersedia di <https://timesofindia.indiatimes.com/india/encounter-underway-between-security-forces-and-terrorists-in-jks-pulwama/articleshow/68041226.cms>.
- Singh, Jitendra. 2019. "FATF decides Pakistan to be on greylis; role of the Financial Action Task Force explained", tersedia di <https://www.timesnownews.com/international/article/financial-action-task-force-pakistan-india-paris-money-laundering-terror-financing-blacklist-greylis/370791>.
- Stimson Center. 1999. "Lahore Summit", tersedia di <https://www.stimson.org/1999/lahore-summit/>.
- Suryanti, Budhi Tri. 2021. "Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional (*Neorealist Approach to National Security Studies*). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Vol. 7 No. 1.
- The Times of India. 2019. "Jaish terrorist attack CRPF convoy in Kashmir, kill at least 40 personnel", tersedia di <https://timesofindia.indiatimes.com/india/37-crpf-jawans-martyred-in-ied-blast-in-jks-pulwama/articleshow/67992189.cms>.
- _____. 2019. "Pulwama terror attack: India hikes customs duty to 200% on all goods imported from Pakistan", tersedia di <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/customs-duty-on-goods-from-pakistan-hiked-to-200-with-immediate-effect/articleshow/68026732.cms>.
- The Tribune Express. 2011. "40,000 people killed in Kashmir: India", tersedia di <https://tribune.com.pk/story/228506/40000-people-killed-in-kashmir-india>.
- Wolf, Siegfried O.. 2021. *Comment 209 – India-Pakistan Relations and the Upcoming Ankara Conference on Afghanistan*. Brussels: South Asia Democratic Forum.
- Yusvitasari, Devi. 2020. "Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan TKI oleh Duta Besar Arab Saudi di Jerman). *Jurnal Locus Delicti*. Vol. 1 No. 2.